WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
16. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
6. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB II
TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 :

a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Magelang;
c. meningkatan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :

a. pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Tindak lanjut sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

(3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara/Daerah tidak terselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Febuari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Febuari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 13

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

NASKAH DINAS (SPI) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi :

1. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis;
2. peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. pengawasan dalam rangka pengaduan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik; dan
4. pengawasan terpadu antar APIP.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MAGELANG.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Pembagian Urusan Pemerintahan :

   ~ Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keuangan Daerah :
   a. kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. kebijakan manajemen kas daerah;
   c. kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
   d. kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
   e. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanuut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
3. Perencanaan Pembangunan daerah :
   a. konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
   b. pengendalian tata ruang; dan
   c. evaluasi capaian target pembangunan daerah.
4. Pelayanan Publik :
   a. pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan; dan
   b. pelayanan perijinan.
5. Kebijakan Daerah :
   a. prosedur penyusunan produk hukum;
   b. inovasi daerah;
   c. tindak lanjuut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
   d. penyelesaian produk hukum sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Kepegawaian :
   a. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
   b. Penempatan pimpinan Perangkat Daerah sesuai kompetensi;
   c. Pembinaan jabatan fungsional Pengawasn Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Pelatihan Masyarakat.

B. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
   1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan priotitas :
      a. program Indonesia Pintar;
      b. kurikulum 2013; dan
      c. peningkatan mutu guru.

2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas :
   a. gerakan masyarakat sehat; dan
   b. jaminan kesenahan nasional.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas :
   a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
   b. penyelenggaraan jalan kota; dan
   c. penyelenggaraan penataan ruang;
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlundungan masyarakat, dengan prioritas :
   a. penanganan gangguan kentetraman dan ketertiban umum;
   b. penanggulangan bencana;
   c. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan kebakaran;
   d. inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
6. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas :
   a. penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
   b. penanganan warga negara mogran korban kekerasan;
   c. pengangan korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
   d. fungsi panti sosial, anak terlantas, dan fakir miskin.
7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas :
   a. penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
   b. pelatihan tenaga kerja;
   c. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
   d. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaka kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lokasi kerja.

8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan ditingkat daerah;
9. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyedaian infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
10. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
11. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas :
    a. penyusunan profile kependudukan; dan
    b. penghelolaan kartu Identitas Anak (KIA).
12. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam wilayah Kota Magelang;
13. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas :
    a. pemberdayaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader; dan
    b. pembinaan terhadap kepramukaan.
14. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas :
    a. pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
    b. memacu gerakan standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
15. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan destinasi unggulan pariwisata;
16. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas :
    a. menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di daerah;
    b. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
    c. penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

C. Pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah, meliputi :

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, terdiri dari :

   a. Aspek keuangan, meliputi :

      1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

      2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

      3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

      4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantusna sosial; dan

      5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

   b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana, meliputi :

      1) pengelolaan persediaan;

      2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan

      3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

   c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi :

      1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

      2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;

      3) pembinaan jabatab fungsional tertentu; dan

      4) pembinaan karis Aparatur Sipil Negara.

   d. Aspek tugas pokok dan fungsi, meliputi :

      1) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

      2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;

      3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan

      4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, dengan prioritas :

   a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;

   b. penyalahgunaan wewenang;

   c. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan

   d. pelanggaran disiplin pegawai.

3. Kegiatan Reviu, dengan prioritas :

a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Angaran Daerah (RKPD dan renja PD, Reviu RKA dan RKA Perubahan);

b. Reviu Laporan Keuangan Daerah; dan

c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

4. Kegiatan Evaluasi, dengan prioritas :

a. Evaluasi penyelanggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

d. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) PD

e. Monitoring pelaksanaan program strategis Kepala Daerah.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya, meliputi :

a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;

b. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pengawasan; dan

d. koordinasi program pengawasan.

6. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

NASKAH DINAS (SPI) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	882.759.301.000,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	217.823.794.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30.096.800.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.780.203.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.488.174.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	582.806.750.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.517.443.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	113.248.063.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	82.128.757.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.768.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000.000,00
2	**BELANJA**	969.216.881.000,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	326.136.404.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	310.620.578.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	9.181.194.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.217.674.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	643.080.477.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	59.263.231.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	360.557.384.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2 . 2 . 3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.457.580.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.520.354.000,00
3 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	103.642.354.000,00
3 . 1 . 8	Penerimaan Hasil Penarikan	150.000.000,00
		3.728.000.000,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
		21.062.774.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.457.580.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

PEJABAT PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA. SUB BID

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2 . 2 . 3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.457.580.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	107.520.354.000,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	103.642.354.000,00
3 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00
3 . 1 . 8	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	21.062.774.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.457.580.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3	Belanja Modal	223.259.862.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.457.580.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	107.520.354.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	103.642.354.000,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	21.062.774.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.457.580.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

Printed By SimDa

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	168.509.739.000,00	197.646.392.000,00	433.538.659.000,00	631.185.051.000,00
1.01	**Pendidikan**	0,00	136.015.488.000,00	50.205.536.000,00	186.221.024.000,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	136.015.488.000,00	49.543.631.000,00	185.559.119.000,00
1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	412.781.000,00	412.781.000,00
1.01 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	86.255.000,00	86.255.000,00
1.01 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	84.094.000,00	84.094.000,00
1.01 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	78.775.000,00	78.775.000,00
1.02	**Kesehatan**	167.038.539.000,00	45.778.856.000,00	270.722.156.000,00	316.501.012.000,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	7.038.539.000,00	21.110.365.000,00	35.365.745.000,00	56.476.110.000,00
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	160.000.000.000,00	24.668.491.000,00	234.223.903.000,00	258.892.394.000,00
1.02 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	214.446.000,00	214.446.000,00
1.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	26.104.000,00	26.104.000,00
1.02 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	286.687.000,00	286.687.000,00
1.02 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	357.637.000,00	357.637.000,00
1.02 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	247.634.000,00	247.634.000,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1.160.100.000,00	3.982.141.000,00	81.991.404.000,00	85.973.545.000,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.100.000,00	3.982.141.000,00	62.217.074.000,00	66.199.215.000,00
1.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	16.268.400.000,00	16.268.400.000,00
1.03 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	1.187.948.000,00	1.187.948.000,00
1.03 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	766.227.000,00	766.227.000,00
1.03 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	1.551.755.000,00	1.551.755.000,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	303.600.000,00	2.556.766.000,00	15.280.813.000,00	17.837.579.000,00
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	303.600.000,00	2.556.766.000,00	13.151.422.000,00	15.708.188.000,00
1.04 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	1.045.467.000,00	1.045.467.000,00
1.04 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.077.674.000,00	1.077.674.000,00
1.04 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	613.206.000,00	613.206.000,00
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	3.058.538.000,00	2.133.635.000,00	5.192.173.000,00
4.03	**Perencanaan**	0,00	3.099.826.000,00	7.073.771.000,00	10.173.597.000,00
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.257.175.000,00	1.257.175.000,00
4.03 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	40.436.000,00	40.436.000,00
4.03 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	172.199.000,00	172.199.000,00
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	159.466.000,00	159.466.000,00
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	181.779.000,00	181.779.000,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.099.826.000,00	5.262.716.000,00	8.362.542.000,00
4.04	**Keuangan**	710.646.996.000,00	22.922.243.000,00	17.352.363.000,00	40.274.606.000,00
4.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	16.070.000,00	16.070.000,00
4.04 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	109.715.000,00	109.715.000,00
4.04 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	76.079.000,00	76.079.000,00
4.04 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	94.909.000,00	94.909.000,00
4.04 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	99.103.000,00	99.103.000,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	710.646.996.000,00	22.922.243.000,00	16.956.487.000,00	39.878.730.000,00
4.05	**Kepegawaian**	0,00	8.418.028.000,00	4.106.887.000,00	12.524.915.000,00
4.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	325.206.000,00	325.206.000,00
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	8.418.028.000,00	3.781.681.000,00	12.199.709.000,00
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	0,00	0,00	1.697.713.000,00	1.697.713.000,00
4.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	145.871.000,00	145.871.000,00
4.06 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	1.551.842.000,00	1.551.842.000,00
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	0,00	2.035.594.000,00	2.139.609.000,00	4.175.203.000,00
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	2.035.594.000,00	2.139.609.000,00	4.175.203.000,00
	JUMLAH	882.759.301.000,00	326.136.404.000,00	643.080.477.000,00	969.216.881.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.457.580.000,00)			

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	
4.04	**Keuangan**	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	107.520.354.000,00	21.062.774.000,00	86.457.580.000,00	

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.18 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	12.264.000,00	12.264.000,00
2.18 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	124.850.000,00	124.850.000,00
2.18 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	26.102.000,00	26.102.000,00
2.18 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	**Urusan Pilihan**	1.956.968.000,00	13.730.117.000,00	28.195.359.000,00	41.925.476.000,00
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	0,00	0,00	828.589.000,00	828.589.000,00
3.01 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	828.589.000,00	828.589.000,00
3.02	**Pariwisata**	0,00	0,00	3.630.240.000,00	3.630.240.000,00
3.02 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	0,00	3.630.240.000,00	3.630.240.000,00
3.03	**Pertanian**	169.325.000,00	4.630.075.000,00	4.618.437.000,00	9.248.512.000,00
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	169.325.000,00	4.630.075.000,00	4.618.437.000,00	9.248.512.000,00
3.05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	0,00	0,00	7.165.245.000,00	7.165.245.000,00
3.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	7.165.245.000,00	7.165.245.000,00
3.06	**Perdagangan**	0,00	0,00	8.088.443.000,00	8.088.443.000,00
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	8.064.114.000,00	8.064.114.000,00
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	24.329.000,00	24.329.000,00
3.07	**Perindustrian**	1.787.643.000,00	9.100.042.000,00	3.680.171.000,00	12.780.213.000,00
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.787.643.000,00	9.100.042.000,00	3.384.140.000,00	12.484.182.000,00
3.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	296.031.000,00	296.031.000,00
3.08	**Transmigrasi**	0,00	0,00	184.234.000,00	184.234.000,00
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	184.234.000,00	184.234.000,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	710.972.930.000,00	85.148.424.000,00	85.614.254.000,00	170.762.678.000,00
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	325.934.000,00	45.614.195.000,00	50.497.070.000,00	96.111.265.000,00
4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	83.313.000,00	83.313.000,00
4.01 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	614.575.000,00	614.575.000,00
4.01 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	0,00	135.153.000,00	135.153.000,00
4.01 . 4.01.01	DPRD	0,00	10.797.873.000,00	0,00	10.797.873.000,00
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	784.386.000,00	0,00	784.386.000,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	13.426.076.000,00	16.341.744.000,00	29.767.820.000,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	2.431.563.000,00	26.414.666.000,00	28.846.229.000,00
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	99.650.000,00	6.235.118.000,00	2.476.334.000,00	8.711.452.000,00
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	147.284.000,00	6.341.277.000,00	2.326.300.000,00	8.667.577.000,00
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	79.000.000,00	5.597.902.000,00	2.104.985.000,00	7.702.887.000,00
4.02	**Pengawasan**	0,00	3.058.538.000,00	2.746.841.000,00	5.805.379.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	0,00	2.738.639.000,00	13.412.920.000,00	16.151.559.000,00
2.13 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	6.137.764.000,00	6.137.764.000,00
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	0,00	2.738.639.000,00	6.531.084.000,00	9.269.723.000,00
2.13 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00
2.13 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	222.101.000,00	222.101.000,00
2.13 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	163.689.000,00	163.689.000,00
2.13 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	173.282.000,00	173.282.000,00
2.14	**Statistik**	0,00	0,00	477.807.000,00	477.807.000,00
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	377.347.000,00	377.347.000,00
2.14 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	94.132.000,00	94.132.000,00
2.14 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	6.328.000,00	6.328.000,00
2.15	**Persandian**	0,00	0,00	155.136.000,00	155.136.000,00
2.15 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	0,00	0,00	155.136.000,00	155.136.000,00
2.16	**Kebudayaan**	0,00	0,00	2.865.251.000,00	2.865.251.000,00
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	2.289.867.000,00	2.289.867.000,00
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	123.296.000,00	123.296.000,00
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	350.283.000,00	350.283.000,00
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	101.805.000,00	101.805.000,00
2.17	**Perpustakaan**	75.000.000,00	2.733.221.000,00	2.819.425.000,00	5.552.646.000,00
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,00	2.733.221.000,00	2.572.641.000,00	5.305.862.000,00
2.17 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	123.447.000,00	123.447.000,00
2.17 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00
2.17 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	41.067.000,00	41.067.000,00
2.18	**Kearsipan**	0,00	0,00	1.654.727.000,00	1.654.727.000,00
2.18 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00
2.18 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.18 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00
2.18 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	12.536.000,00	12.536.000,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	856.486.000,00	856.486.000,00
2.18 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	34.611.000,00	34.611.000,00
2.18 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	23.384.000,00	23.384.000,00
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	154.462.000,00	154.462.000,00
2.18 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	51.582.000,00	51.582.000,00
2.18 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	93.388.000,00	93.388.000,00
2.18 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	137.588.000,00	137.588.000,00
2.18 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	54.459.000,00	54.459.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.06 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	321.592.000,00	321.592.000,00
2.06 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	234.436.000,00	234.436.000,00
2.06 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	134.243.000,00	134.243.000,00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	16.500.000,00	3.013.126.000,00	3.508.207.000,00	6.521.333.000,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.500.000,00	3.013.126.000,00	2.881.541.000,00	5.894.667.000,00
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	232.745.000,00	232.745.000,00
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	142.184.000,00	142.184.000,00
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	251.737.000,00	251.737.000,00
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	0,00	0,00	1.055.840.000,00	1.055.840.000,00
2.08 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00
2.08 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	9.652.000,00	9.652.000,00
2.08 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	31.888.000,00	31.888.000,00
2.09	**Perhubungan**	1.036.164.000,00	3.024.772.000,00	7.476.872.000,00	10.501.644.000,00
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	1.036.164.000,00	3.024.772.000,00	7.476.872.000,00	10.501.644.000,00
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	30.000.000,00	2.827.736.000,00	11.581.334.000,00	14.409.070.000,00
2.10 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	11.254.000,00	11.254.000,00
2.10 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	7.544.000,00	7.544.000,00
2.10 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	7.346.000,00	7.346.000,00
2.10 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.10 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	30.000.000,00	2.827.736.000,00	8.235.140.000,00	11.062.876.000,00
2.10 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	12.071.000,00	12.071.000,00
2.10 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
2.10 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	2.919.951.000,00	2.919.951.000,00
2.10 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	284.356.000,00	284.356.000,00
2.10 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	12.410.000,00	12.410.000,00
2.10 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	17.262.000,00	17.262.000,00
2.10 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.10 . 4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	0,00	0,00	1.068.517.000,00	1.068.517.000,00
2.11 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	919.147.000,00	919.147.000,00
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	106.178.000,00	106.178.000,00
2.11 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	43.192.000,00	43.192.000,00
2.12	**Penanaman Modal**	0,00	2.431.019.000,00	1.709.993.000,00	4.141.012.000,00
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.431.019.000,00	1.709.993.000,00	4.141.012.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	7.500.000,00	7.229.184.000,00	12.331.694.000,00	19.560.878.000,00
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	4.718.030.000,00	5.614.966.000,00	10.332.996.000,00
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	2.511.154.000,00	2.210.268.000,00	4.721.422.000,00
1.05 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	21.602.000,00	21.602.000,00
1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.422.124.000,00	1.422.124.000,00
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	1.091.085.000,00	1.091.085.000,00
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	1.025.634.000,00	1.025.634.000,00
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	946.015.000,00	946.015.000,00
1.06	**Sosial**	0,00	2.083.957.000,00	3.007.056.000,00	5.091.013.000,00
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	2.083.957.000,00	2.553.999.000,00	4.637.956.000,00
1.06 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	88.683.000,00	88.683.000,00
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	364.374.000,00	364.374.000,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	1.319.664.000,00	29.611.471.000,00	95.732.205.000,00	125.343.676.000,00
2.01	**Tenaga Kerja**	0,00	2.454.455.000,00	4.268.437.000,00	6.722.892.000,00
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	0,00	2.454.455.000,00	4.268.437.000,00	6.722.892.000,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	0,00	0,00	1.311.571.000,00	1.311.571.000,00
2.02 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	828.508.000,00	828.508.000,00
2.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	90.272.000,00	90.272.000,00
2.02 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	77.505.000,00	77.505.000,00
2.02 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	186.110.000,00	186.110.000,00
2.02 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	129.176.000,00	129.176.000,00
2.03	**Pangan**	0,00	0,00	437.672.000,00	437.672.000,00
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	437.672.000,00	437.672.000,00
2.04	**Pertanahan**	0,00	0,00	5.830.551.000,00	5.830.551.000,00
2.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	5.830.551.000,00	5.830.551.000,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	162.000.000,00	7.907.811.000,00	32.487.283.000,00	40.395.094.000,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	162.000.000,00	7.907.811.000,00	28.877.867.000,00	36.785.678.000,00
2.05 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	1.478.052.000,00	1.478.052.000,00
2.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	366.634.000,00	366.634.000,00
2.05 . 4.01.05	Kecamatan Magelang Selatan	0,00	0,00	512.288.000,00	512.288.000,00
2.05 . 4.01.06	Kecamatan Magelang Tengah	0,00	0,00	678.654.000,00	678.654.000,00
2.05 . 4.01.07	Kecamatan Magelang Utara	0,00	0,00	573.788.000,00	573.788.000,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	0,00	2.480.692.000,00	3.610.662.000,00	6.091.354.000,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	2.480.692.000,00	2.920.391.000,00	5.401.083.000,00

Printed By SimDa

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG / KA SUB BID	

Printed By SimDa

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

Printed By SimDa

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

PrintTed By SimDa

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	187.848.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	136.015.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	136.015.488.000,00	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	51.833.498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.254.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	*Penyediaan jasa surat menyurat*	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	*Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	224.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	*Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional*	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	*Penyediaan jasa administrasi keuangan*	849.181.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	*Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi*	49.461.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	*Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi*	222.841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SUB BAG / KA SUB BID	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	*Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi*	49.461.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	*Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi*	222.841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.505.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	*Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi*	49.461.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.021.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	*Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi*	222.841.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.941.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.187.203.000,00)	

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	25.472.397.000,00	225.920.111.000,00	182.146.151.000,00	433.538.659.000,00
1.01	**Pendidikan**	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	50.205.536.000,00
1.01 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	4.328.846.000,00	38.954.853.000,00	6.259.932.000,00	49.543.631.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	823.800.000,00	1.430.266.000,00	0,00	2.254.066.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	224.980.000,00	0,00	224.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	821.400.000,00	27.781.000,00	0,00	849.181.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	179.484.000,00	0,00	179.484.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	68.450.000,00	0,00	68.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.622.000,00	0,00	9.622.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	17.168.000,00	0,00	17.168.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	129.480.000,00	0,00	129.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	344.120.000,00	0,00	344.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	0,00	297.912.000,00	0,00	297.912.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	2.400.000,00	18.875.000,00	0,00	21.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	1.500.000,00	651.464.000,00	161.085.000,00	814.049.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	450.000,00	17.600.000,00	0,00	18.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	146.950.000,00	146.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	14.135.000,00	14.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.050.000,00	50.000.000,00	0,00	51.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	521.349.000,00	0,00	521.349.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	18.815.000,00	0,00	18.815.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00
	JUMLAH	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	643.080.477.000,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA BAGIAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAGIAN / KA. SUB BID	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00
	JUMLAH	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	643.080.477.000,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07 . 4.07.01 . 19 . 04	Fasilitasi kepesertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	13.440.000,00	36.021.000,00	0,00	49.461.000,00
4.07 . 4.07.01 . 19 . 05	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	45.900.000,00	176.941.000,00	0,00	222.841.000,00
	JUMLAH	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	643.080.477.000,00

MAGELANG, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01			**PELAYANAN UMUM**	72.460.334.000,00	15.515.826.000,00	24.002.341.000,00	67.124.129.000,00	8.794.460.000,00	187.897.090.000,00
01	2	03	Pangan	0,00	0,00	50.900.000,00	386.772.000,00	0,00	437.672.000,00
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	2.827.736.000,00	0,00	2.198.810.000,00	7.159.486.000,00	2.223.038.000,00	14.409.070.000,00
01	2	14	Statistik	0,00	0,00	281.414.000,00	150.643.000,00	45.750.000,00	477.807.000,00
01	2	15	Persandian	0,00	0,00	43.400.000,00	111.736.000,00	0,00	155.136.000,00
01	2	18	Kearsipan	0,00	0,00	739.812.000,00	869.165.000,00	45.750.000,00	1.654.727.000,00
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	45.614.195.000,00	0,00	6.646.540.000,00	38.274.948.000,00	5.575.582.000,00	96.111.265.000,00
01	4	02	Pengawasan	3.058.538.000,00	0,00	1.643.875.000,00	1.102.966.000,00	0,00	5.805.379.000,00
01	4	03	Perencanaan	3.099.826.000,00	0,00	2.241.230.000,00	4.832.541.000,00	0,00	10.173.597.000,00
01	4	04	Keuangan	7.406.417.000,00	15.515.826.000,00	8.320.173.000,00	8.127.850.000,00	904.340.000,00	40.274.606.000,00
01	4	05	Kepegawaian	8.418.028.000,00	0,00	1.377.362.000,00	2.729.525.000,00	0,00	12.524.915.000,00
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	36.350.000,00	1.661.363.000,00	0,00	1.697.713.000,00
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	2.035.594.000,00	0,00	422.475.000,00	1.717.134.000,00	0,00	4.175.203.000,00
03			**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	7.229.184.000,00	0,00	3.410.043.000,00	8.921.651.000,00	0,00	19.560.878.000,00
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.229.184.000,00	0,00	3.410.043.000,00	8.921.651.000,00	0,00	19.560.878.000,00
04			**EKONOMI**	24.653.489.000,00	0,00	4.872.722.000,00	31.702.571.000,00	6.021.852.000,00	67.250.634.000,00
04	2	01	Tenaga Kerja	2.454.455.000,00	0,00	446.316.000,00	3.579.493.000,00	242.628.000,00	6.722.892.000,00
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.013.126.000,00	0,00	355.525.000,00	3.128.082.000,00	24.600.000,00	6.521.333.000,00
04	2	09	Perhubungan	3.024.772.000,00	0,00	1.016.983.000,00	3.418.138.000,00	3.041.751.000,00	10.501.644.000,00
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	181.650.000,00	886.867.000,00	0,00	1.068.517.000,00
04	2	12	Penanaman Modal	2.431.019.000,00	0,00	268.516.000,00	1.388.527.000,00	52.950.000,00	4.141.012.000,00
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	34.800.000,00	528.789.000,00	265.000.000,00	828.589.000,00
04	3	03	Pertanian	4.630.075.000,00	0,00	416.364.000,00	3.972.814.000,00	229.259.000,00	9.248.512.000,00
04	3	05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	53.142.000,00	6.503.661.000,00	608.442.000,00	7.165.245.000,00
04	3	06	Perdagangan	0,00	0,00	1.386.808.000,00	5.206.213.000,00	1.495.422.000,00	8.088.443.000,00
04	3	07	Perindustrian	9.100.042.000,00	0,00	691.268.000,00	2.927.103.000,00	61.800.000,00	12.780.213.000,00

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
04	3	08	Transmigrasi	0,00	0,00	21.350.000,00	162.884.000,00	0,00	184.234.000,00
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	7.907.811.000,00	0,00	2.592.068.000,00	16.797.490.000,00	18.928.276.000,00	46.225.645.000,00
05	2	04	Pertanahan	0,00	0,00	8.400.000,00	44.010.000,00	5.778.141.000,00	5.830.551.000,00
05	2	05	Lingkungan Hidup	7.907.811.000,00	0,00	2.583.668.000,00	16.753.480.000,00	13.150.135.000,00	40.395.094.000,00
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	6.538.907.000,00	0,00	2.562.940.000,00	17.787.013.000,00	76.922.264.000,00	103.811.124.000,00
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.982.141.000,00	0,00	1.390.624.000,00	8.377.991.000,00	72.222.789.000,00	85.973.545.000,00
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.556.766.000,00	0,00	1.172.316.000,00	9.409.022.000,00	4.699.475.000,00	17.837.579.000,00
07			**KESEHATAN**	45.778.856.000,00	0,00	14.435.021.000,00	158.328.171.000,00	99.014.804.000,00	317.556.852.000,00
07	1	02	Kesehatan	45.778.856.000,00	0,00	14.400.771.000,00	157.391.581.000,00	98.929.804.000,00	316.501.012.000,00
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	34.250.000,00	936.590.000,00	85.000.000,00	1.055.840.000,00
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	0,00	0,00	293.082.000,00	4.638.659.000,00	1.563.750.000,00	6.495.491.000,00
08	2	16	Kebudayaan	0,00	0,00	150.575.000,00	2.670.926.000,00	43.750.000,00	2.865.251.000,00
08	3	02	Pariwisata	0,00	0,00	142.507.000,00	1.967.733.000,00	1.520.000.000,00	3.630.240.000,00
10			**PENDIDIKAN**	141.487.348.000,00	0,00	5.372.638.000,00	49.286.357.000,00	11.778.886.000,00	207.925.229.000,00
10	1	01	Pendidikan	136.015.488.000,00	0,00	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	186.221.024.000,00
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.738.639.000,00	0,00	554.845.000,00	7.459.195.000,00	5.398.880.000,00	16.151.559.000,00
10	2	17	Perpustakaan	2.733.221.000,00	0,00	425.222.000,00	2.274.129.000,00	120.074.000,00	5.552.646.000,00
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	4.564.649.000,00	0,00	1.722.376.000,00	5.971.343.000,00	235.570.000,00	12.493.938.000,00
11	1	06	Sosial	2.083.957.000,00	0,00	706.072.000,00	2.266.833.000,00	34.151.000,00	5.091.013.000,00
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	179.730.000,00	1.131.841.000,00	0,00	1.311.571.000,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.480.692.000,00	0,00	836.574.000,00	2.572.669.000,00	201.419.000,00	6.091.354.000,00
				310.620.578.000,00	15.515.826.000,00	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	969.216.881.000,00

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA SUB BID

MAGELANG, 20 December 2017
WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
04	3	08	Transmigrasi	0,00	0,00	21.350.000,00	162.884.000,00	0,00	184.234.000,00
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	7.907.811.000,00	0,00	2.592.068.000,00	16.797.490.000,00	18.928.276.000,00	46.225.645.000,00
05	2	04	Pertanahan	0,00	0,00	8.400.000,00	44.010.000,00	5.778.141.000,00	5.830.551.000,00
05	2	05	Lingkungan Hidup	7.907.811.000,00	0,00	2.583.668.000,00	16.753.480.000,00	13.150.135.000,00	40.395.094.000,00
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	6.538.907.000,00	0,00	2.562.940.000,00	17.787.013.000,00	76.922.264.000,00	103.811.124.000,00
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.982.141.000,00	0,00	1.390.624.000,00	8.377.991.000,00	72.222.789.000,00	85.973.545.000,00
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.556.766.000,00	0,00	1.172.316.000,00	9.409.022.000,00	4.699.475.000,00	17.837.579.000,00
07			**KESEHATAN**	45.778.856.000,00	0,00	14.435.021.000,00	158.328.171.000,00	99.014.804.000,00	317.556.852.000,00
07	1	02	Kesehatan	45.778.856.000,00	0,00	14.400.771.000,00	157.391.581.000,00	98.929.804.000,00	316.501.012.000,00
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	34.250.000,00	936.590.000,00	85.000.000,00	1.055.840.000,00
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	0,00	0,00	293.082.000,00	4.638.659.000,00	1.563.750.000,00	6.495.491.000,00
08	2	16	Kebudayaan	0,00	0,00	150.575.000,00	2.670.926.000,00	43.750.000,00	2.865.251.000,00
08	3	02	Pariwisata	0,00	0,00	142.507.000,00	1.967.733.000,00	1.520.000.000,00	3.630.240.000,00
10			**PENDIDIKAN**	141.487.348.000,00	0,00	5.372.638.000,00	49.286.357.000,00	11.778.886.000,00	207.925.229.000,00
10	1	01	Pendidikan	136.015.488.000,00	0,00	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	186.221.024.000,00
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.738.639.000,00	0,00	554.845.000,00	7.459.195.000,00	5.398.880.000,00	16.151.559.000,00
10	2	17	Perpustakaan	2.733.221.000,00	0,00	425.222.000,00	2.274.129.000,00	120.074.000,00	5.552.646.000,00
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	4.564.649.000,00	0,00	1.722.376.000,00	5.971.343.000,00	235.570.000,00	12.493.938.000,00
11	1	06	Sosial	2.083.957.000,00	0,00	706.072.000,00	2.266.833.000,00	34.151.000,00	5.091.013.000,00
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	179.730.000,00	1.131.841.000,00	0,00	1.311.571.000,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.480.692.000,00	0,00	836.574.000,00	2.572.669.000,00	201.419.000,00	6.091.354.000,00
				310.620.578.000,00	15.515.826.000,00	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	969.216.881.000,00

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

KODE			URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
				PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
04	3	08	Transmigrasi	0,00	0,00	21.350.000,00	162.884.000,00	0,00	184.234.000,00
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	7.907.811.000,00	0,00	2.592.068.000,00	16.797.490.000,00	18.928.276.000,00	46.225.645.000,00
05	2	04	Pertanahan	0,00	0,00	8.400.000,00	44.010.000,00	5.778.141.000,00	5.830.551.000,00
05	2	05	Lingkungan Hidup	7.907.811.000,00	0,00	2.583.668.000,00	16.753.480.000,00	13.150.135.000,00	40.395.094.000,00
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	6.538.907.000,00	0,00	2.562.940.000,00	17.787.013.000,00	76.922.264.000,00	103.811.124.000,00
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.982.141.000,00	0,00	1.390.624.000,00	8.377.991.000,00	72.222.789.000,00	85.973.545.000,00
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.556.766.000,00	0,00	1.172.316.000,00	9.409.022.000,00	4.699.475.000,00	17.837.579.000,00
07			**KESEHATAN**	45.778.856.000,00	0,00	14.435.021.000,00	158.328.171.000,00	99.014.804.000,00	317.556.852.000,00
07	1	02	Kesehatan	45.778.856.000,00	0,00	14.400.771.000,00	157.391.581.000,00	98.929.804.000,00	316.501.012.000,00
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	34.250.000,00	936.590.000,00	85.000.000,00	1.055.840.000,00
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	0,00	0,00	293.082.000,00	4.638.659.000,00	1.563.750.000,00	6.495.491.000,00
08	2	16	Kebudayaan	0,00	0,00	150.575.000,00	2.670.926.000,00	43.750.000,00	2.865.251.000,00
08	3	02	Pariwisata	0,00	0,00	142.507.000,00	1.967.733.000,00	1.520.000.000,00	3.630.240.000,00
10			**PENDIDIKAN**	141.487.348.000,00	0,00	5.372.638.000,00	49.286.357.000,00	11.778.886.000,00	207.925.229.000,00
10	1	01	Pendidikan	136.015.488.000,00	0,00	4.392.571.000,00	39.553.033.000,00	6.259.932.000,00	186.221.024.000,00
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.738.639.000,00	0,00	554.845.000,00	7.459.195.000,00	5.398.880.000,00	16.151.559.000,00
10	2	17	Perpustakaan	2.733.221.000,00	0,00	425.222.000,00	2.274.129.000,00	120.074.000,00	5.552.646.000,00
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	4.564.649.000,00	0,00	1.722.376.000,00	5.971.343.000,00	235.570.000,00	12.493.938.000,00
11	1	06	Sosial	2.083.957.000,00	0,00	706.072.000,00	2.266.833.000,00	34.151.000,00	5.091.013.000,00
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	179.730.000,00	1.131.841.000,00	0,00	1.311.571.000,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.480.692.000,00	0,00	836.574.000,00	2.572.669.000,00	201.419.000,00	6.091.354.000,00
				310.620.578.000,00	15.515.826.000,00	59.263.231.000,00	360.557.384.000,00	223.259.862.000,00	969.216.881.000,00

MAGELANG, 20 December 2017

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**28**	**94**	**8**	**0**	**619**	**7**	**756**
Golongan III/d			11	236	0	215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1		210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**11**	**371**	**0**	**748**	**440**	**1570**
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**545**	**694**
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105**	**105**
TOTAL	**0**	**28**	**105**	**379**	**0**	**1516**	**1097**	**3125**

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA SUB BID

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**28**	**94**	**8**	**0**	**619**	**7**	**756**
Golongan III/d			11	236	0	215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1		210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**11**	**371**	**0**	**748**	**440**	**1570**
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**545**	**694**
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105**	**105**
TOTAL	**0**	**28**	**105**	**379**	**0**	**1516**	**1097**	**3125**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINGRITO

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		24	1			11		36
Golongan IV/b		3	36			38		77
Golongan IV/a			57	8		568	7	640
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**28**	**94**	**8**	**0**	**619**	**7**	**756**
Golongan III/d			11	236	0	215	19	481
Golongan III/c				115	0	167	67	349
Golongan III/b				19	0	156	276	451
Golongan III/a				1		210	78	289
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**11**	**371**	**0**	**748**	**440**	**1570**
Golongan II/d						93	70	163
Golongan II/c						20	303	323
Golongan II/b						23	56	79
Golongan II/a						13	116	129
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**545**	**694**
Golongan I/d							13	13
Golongan I/c							74	74
Golongan I/b							18	18
Golongan I/a								0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105**	**105**
TOTAL	**0**	**28**	**105**	**379**	**0**	**1516**	**1097**	**3125**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	PIUTANG PAJAK DAERAH		**13.003.098.737,00**	**0,00**	**938.719.626,00**	**12.064.379.111,00**
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2016	637.559.426,00	0,00	637.559.426,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air Tanah	2016	1.846.000,00	0,00	1.134.400,00	711.600,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2016	12.363.673.311,00	0,00	300.005.800,00	12.063.667.511,00
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		**894.116.296,00**	**0,00**	**0,00**	**894.116.296,00**
1	Piutang Retribusi Pasar	2003	264.988.630,00	0,00	0,00	264.988.630,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Pasar)	2015	10.737.216,00	0,00	0,00	10.737.216,00
3	Piutang Retribusi IMB	2009	609.113.000,00	0,00	0,00	609.113.000,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Tanah	2014	9.277.450,00	0,00	0,00	9.277.450,00
	PIUTANG LAIN-LAIN PADA YANG SAH		**22.920.455.232,57**	**0,00**	**123.458.904,11**	**22.796.996.328,46**
1	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Dinas Perhubungan, Kominfo)	2002	130.127.025,00	0,00	0,00	130.127.025,00
2	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (RSUD Tidar)	2014	21.942.436.391,00	0,00	0,00	21.942.436.391,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasar Penampungan Rejowinangun)	2010	565.708.000,00		0,00	565.708.000,00
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Kepada Pihak Ketiga)	2011	45.499.419,46		0,00	45.499.419,46
5	Piutang BLUD Puskesmas (Klaim BPJS)	2015	14.010.000,00		0,00	14.010.000,00

6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		**3.484.393.472,00**	**0,00**	**3.484.393.472,00**	**0,00**
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		**3.924.745.859,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**3.922.745.859,00**
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00		0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
Jumlah			**44.226.809.596,57**	**0,00**	**4.548.572.002,11**	**39.678.237.594,46**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		**3.484.393.472,00**	**0,00**	**3.484.393.472,00**	**0,00**
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		**3.924.745.859,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**3.922.745.859,00**
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00		0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
Jumlah			**44.226.809.596,57**	**0,00**	**4.548.572.002,11**	**39.678.237.594,46**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8-9	11=6-10	12	13	14=10-13
1	1979	PDAM Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang	Perda No 3 Tahun 2013	Saham		15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal		31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.040.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PRPP Jawa Tengah		Saham	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1999/2000	PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PD Perbengkelan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	1.879.753.981,70		0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PD Percetakan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	3.591.101.410,25		0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	BPR - BKK Magelang		Penyertaan Modal	0,00	5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					**0,00**	**99.555.858.705,05**	**21.062.774.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**	**0,00**	**7.458.617.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**

Magelang, 20 Desember 2017
WALI KOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONUGROHO

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=7+8-9*	*11=6-10*	*12*	*13*	*14=10-13*
1	1979	PDAM Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang	Perda No 3 Tahun 2013	Saham		15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal		31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.040.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PRPP Jawa Tengah		Saham	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1999/2000	PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PD Perbengkelan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	1.879.753.981,70		0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PD Percetakan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	3.591.101.410,25		0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	BPR - BKK Magelang		Penyertaan Modal	0,00	5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					**0,00**	**99.555.858.705,05**	**21.062.774.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**	**0,00**	**7.458.617.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Pengurangan penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8-9	11=6-10	12	13	14=10-13
1	1979	PDAM Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	22.465.342.450,79	6.562.774.000,00	0,00	29.028.116.450,79	0,00	1.529.520.000,00	0,00	29.028.116.450,79
2		Bank Pembangunan Daerah Kota Magelang	Perda No 3 Tahun 2013	Saham		15.900.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	2.178.456.000,00	0,00	24.400.000.000,00
3	1986/1987	Bank Magelang Kota Magelang		Penyertaan Modal		31.544.047.269,28	3.000.000.000,00	0,00	34.544.047.269,28	0,00	2.040.165.000,00	0,00	34.544.047.269,28
4	1995	PRPP Jawa Tengah		Saham	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5	1999/2000	PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	18.343.809.676,71	2.500.000.000,00	0,00	20.843.809.676,71	0,00	1.452.192.000,00	0,00	20.843.809.676,71
7	2002	PD Perbengkelan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	1.879.753.981,70		0,00	1.879.753.981,70	0,00	55.461.000,00	0,00	1.879.753.981,70
8	2002	PD Percetakan Kota Magelang		Penyertaan Modal	0,00	3.591.101.410,25		0,00	3.591.101.410,25	0,00	24.967.000,00	0,00	3.591.101.410,25
9	2007	BPR - BKK Magelang		Penyertaan Modal	0,00	5.681.803.916,32	500.000.000,00	0,00	6.181.803.916,32	0,00	177.856.000,00	0,00	6.181.803.916,32
Jumlah					**0,00**	**99.555.858.705,05**	**21.062.774.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**	**0,00**	**7.458.617.000,00**	**0,00**	**120.618.632.705,05**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINGRUM

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		**2.500.007.190.531,80**	**95.170.961.926,00**	**0,00**	**2.595.178.152.457,80**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA. BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA. BID
5. KA. SUB BAG/ KA. SUB BID

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		**2.500.007.190.531,80**	**95.170.961.926,00**	**0,00**	**2.595.178.152.457,80**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Tanah	1.561.853.532.620,40	5.550.650,00	0,00	1.561.859.083.270,40
2	Peralatan dan Mesin	424.799.734.189,27	56.048.214.049,00	0,00	480.847.948.238,27
3	Gedung dan Bangunan	601.388.084.569,48	19.171.818.543,00	0,00	620.559.903.112,48
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	784.700.988.086,56	7.798.916.649,00	0,00	792.499.904.735,56
5	Aset Tetap Lainnya	43.811.793.704,31	864.161.895,00	0,00	44.675.955.599,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.389.754.400,00	11.282.300.140,00	0,00	23.672.054.540,00
7	Akumulasi Penyusutan	(928.936.697.038,22)	-	0,00	(928.936.697.038,22)
Jumlah		**2.500.007.190.531,80**	**95.170.961.926,00**	**0,00**	**2.595.178.152.457,80**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176.588,00	198.811.500,00	0,00	10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567.716,88	0,00	0,00	146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	0,00	0,00	(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00	(40.203.443.820,45)
Jumlah		**120.044.315.825,90**	**198.811.500,00**	**0,00**	**120.243.127.325,90**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA SUB BID

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176.588,00	198.811.500,00	0,00	10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567.716,88	0,00	0,00	146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	0,00	0,00	(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00	(40.203.443.820,45)
Jumlah		**120.044.315.825,90**	**198.811.500,00**	**0,00**	**120.243.127.325,90**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KOTA MAGELANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo akhir tahun 2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.468.000.000,00	0,00	0,00	12.468.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	10.631.176.588,00	198.811.500,00	0,00	10.829.988.088,00
3	Aset Lain - lain	146.596.567.716,88	0,00	0,00	146.596.567.716,88
4	Amortisasi	(9.447.984.658,53)	0,00	0,00	(9.447.984.658,53)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.203.443.820,45)	0,00	0,00	(40.203.443.820,45)
Jumlah		**120.044.315.825,90**	**198.811.500,00**	**0,00**	**120.243.127.325,90**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2017	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA SUB BID

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2017	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA.2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA. 2017	
				APBD TA. 2017	Perubahan APBD TA. 2017		APBD TA.2018	Perubahan APBD TA. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari kas daerah	Transfer ke kas daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIT
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA. SUB BID

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASIS
1. Ka Bag

LAMPIRAN XII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari kas daerah	Transfer ke kas daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari kas daerah	Transfer ke kas daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/ obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
1. ASISTEN
1. Ka Bag

PEJABAT | PARAF
1. SEKDA
2. KA BADAN
3. SEKRETARIS
4. KA BID
5. KA SUB BAG / KA. SUB BID

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/ obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/ obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/ obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Pasar Cacaban)	2015	606.880,00	0,00	0,00	606.880,00
7	Piutang Bunga Deposito	2016	123.458.904,11	0,00	123.458.904,11	0,00
8	Piutang BPJS UPT Farmasi	2016	98.608.613,00	0,00	0,00	98.608.613,00
	PIUTANG TRANSFER		**3.484.393.472,00**	**0,00**	**3.484.393.472,00**	**0,00**
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2016	3.484.393.472,00	0,00	3.484.393.472,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA		**3.924.745.859,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**3.922.745.859,00**
1	Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan)	2002	19.175.386,00	0,00	0,00	19.175.386,00
2	Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan)	2004	2.248.369.600,00	0,00	2.000.000,00	2.246.369.600,00
3	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir PK/ Koperasi)	2003 s/d 2011	100.791.500,00	0,00	0,00	100.791.500,00
4	Piutang Lain-Lain (Modal Penyertaan Koperasi)	2007 s/d 2013	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00
5	Piutang Lain-Lain (Dana Bergulir Kelompok)	2012 s/d 2014	1.274.000.000,00		0,00	1.274.000.000,00
6	Piutang Lain-Lain (LPT - INDAG)	2005 s/d 2012	124.409.373,00	0,00	0,00	124.409.373,00
Jumlah			**44.226.809.596,57**	**0,00**	**4.548.572.002,11**	**39.678.237.594,46**

Magelang, 20 Desember 2017
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO